



**SELASA, 17 APRIL 2018**

**PROGRAM BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     NEGATIF

| SUMBER BERITA       |   |                   |  |
|---------------------|---|-------------------|--|
| • RAKYAT BENGKULU   | X | • MEDIA INDONESIA |  |
| • BENGKULU EKSPRESS |   | • KOMPAS          |  |
| • RADAR BENGKULU    |   | • .....           |  |

## DD dan ADD Belum Cair

**MUKOMUKO** - Akibat kesiapan desa tidak matang, dipastikan pencairan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2018 ini mengalami keterlambatan. Terbukti hingga pertengahan bulan April ini, belum ada satupun desa yang mencairkan anggaran untuk membangun desa itu.

Hingga kemarin, baru ada 17 desa yang mengajukan APBDes ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD. Sementara 121 desa lainnya, belum juga menyampaikan APBDes. Padahal dokumen tersebut salah satu syarat administrasi untuk pencairan DD dan ADD.

Kabid Pemerintahan Desa DPMD Mukomuko, Eka Purwanto mengatakan, untuk 17 desa yang sudah menyampaikan APBDes, sudah dievaluasi oleh pihak kecamatan. Selanjutnya DPMD akan membuat draf SK Bupati Mukomuko atas evaluasi APBDes tersebut. "Mana yang sudah memasukkan APBDes langsung akan kita ajukan draft evaluasi oleh bupati sebelum anggaran itu disalurkan ke rekening desa yang bersangkutan. Pasti makin terlambat, karena dari 148 desa yang ada, baru 17 desa yang mengajukan APBDes," terangnya.

Diketahui sejumlah desa yang

belum menyampaikan APBDes, lantaran pembuatan draft pembangunan yang dituangkan dalam APBDes belum tuntas. Termasuk pembuatan draft untuk pembangunan fisiknya. Padahal, kata Eka, seluruh desa sudah mendapatkan pelatihan khusus untuk pembuatan atau perancangan APBDes.

Tapi pada kenyataannya, masih banyak juga desa yang belum memahaminya. Hingga mengakibatkan pencairan DD maupun ADD mengalami keterlambatan. "DPMD sudah sering sekali memberikan surat edaran kepada desa supaya segera menyerahkan APBDes untuk pencairan DD dan

ADD. Kalau sampai April ini tidak juga menyerahkan, itu bukan kesalahan dari pemerintah, tapi dari desa yang lambat menyampaikan APBDes ke Pemkab," katanya.

Padahal, lanjut Eka, anggaran DD yang bersumber dari APBN telah dikucurkan oleh pemerintah pusat dan sekarang masih tersimpan di kas daerah (kasda). "Kalau acuan, tujuh hari setelah anggaran dikucurkan maka bisa disalurkan langsung ke rekening desa untuk membangun desa. Tapi mau bagaimana lagi, sampai sekarang baru ada 17 desa yang baru mengajukan pencairan. Selebihnya belum diketahui," tutupnya. (hue)